

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN

Anugrahani Prasetyowati

Email : anugrahani79@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research entitled “The Influence of Economic and Social Factors to Degree of Poverty in South Sumatra. The aim of this research is to know the influence factors of economic growth, inflation, population growth, educational, regional and economic condition to poverty degree in South Sumatra. The source of data used in this research is secondary data that found from BPS South Sumatra Province consist of the data of poverty, economic growth, inflation, population growth, the number school participation, and other supported data. The method of analysis used in this research is descriptive analysis and double linear regression analysis. According to the research found that (1) From some factors predicted influenced the poverty degree in South Sumatra in fact economic growth, inflation, and education significantly have negative influence to poverty in South Sumatra Province with elasticity degree for economic growth is 0.417, inflation has elasticity as 0.068 and elasticity of education is 0.291. (2) Poverty degree in South Sumatra has difference in economic condition (before and after crisis 1997) also has differences according to region (city and village) which pointed by difference of model poverty degree base on crisis condition and regional classification. (3) Based on the result of overlay, from the fourth model pointed in the result, actually the highest constanta grade is in condition after crisis in city (48.351), it means degree of poverty after crisis in city is higher compared with other conditions. (4) From some variables, only one variable which is not significant influenced poverty growth in South Sumatra, namely population growth.

Keywords: Poverty, Economic Growth, Inflation, Population Growth, Education.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di wilayah regional manapun. Kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya bagi suatu negara. Oleh karena itu mengurangi tingkat kemiskinan selalu menjadi tujuan di hampir setiap negara. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat ini dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita rakyat (Debraj, 1998:8).

Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia merupakan dua hal penting yang harus dilakukan dalam penurunan tingkat kemiskinan suatu negara. Pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) yang berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya. Kuswara meneliti tentang pola pengaruh

pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun (Kuswara, 2003:48).

Banyak kalangan peneliti dan analis menjadikan parameter pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi. Akan tetapi perlu diwaspadai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 5% sampai 6% per tahun, belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di negara kita saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah (Liani, 2008:2).

Widjojo Nitisastro dalam harian umum Sinar Harapan, (Selasa, 10 November 2009) mengungkapkan, kunci penanggulangan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Pemerintah diharapkan lebih fokus pada dua hal tersebut. Hal ini diungkapkan Widjojo dalam acara "Curah Pendapat tentang Kemiskinan" dalam rangka peringatan ulang tahun Bappenas ke-56. "Masalah stabilisasi harga untuk pengendalian inflasi adalah langkah utama untuk menurunkan angka kemiskinan". Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Emil Salim yang juga alumni Bappenas menjelaskan, pengendalian inflasi harus menjadi prioritas pertama dalam upaya pengendalian kemiskinan. Menurut pendapatnya, "Kalau inflasi tidak terkendali, yang paling berat orang miskin."

Menurut teori Nurkse (Kuncoro, 2004:157), kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pada pertengahan tahun 1997 pondasi perekonomian Indonesia yang sudah dibangun sekian lama mengalami guncangan yang sangat hebat. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter telah mengguncang perekonomian Indonesia pada umumnya dan perekonomian di Sumatera Selatan pada khususnya. Krisis ini juga berimbas pada indikator makro lainnya seperti inflasi yang

meningkat hingga mencapai angka 89 persen (BPS, 2008:64). Tingginya angka inflasi ini menyebabkan tingkat harga terutama harga barang kebutuhan pokok melonjak drastis. Situasi ini semakin memperparah kemiskinan yang pada masa sebelum krisis belum teratasi secara berarti. Sementara itu, tingkat pengangguran juga meningkat signifikan akibat semakin minimnya lapangan pekerjaan dan PHK massal beberapa perusahaan dan industri yang berhenti beroperasi karena tingginya biaya produksi akibat depresiasi rupiah.

Secara perlahan Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan walaupun masih menyisakan permasalahan mendasar akibat stagnasi ekonomi di masa krisis. Kondisi perekonomian di Indonesia yang seperti itu berimbas pula terhadap semua daerah yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut data BPS (2003:430), Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan kembali ke tingkat pertumbuhan positif sebesar 3,18 persen dan terus meningkat lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Secara umum tren pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan belum kembali seperti masa sebelum krisis. Pertumbuhan ekonomi yang lambat pulih tersebut diiringi dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat. Walaupun laju pertumbuhan sudah mencapai 5 persen, namun hal tersebut belum secara nyata dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional, mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja, sehingga seharusnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Todaro dalam Budiyanto (2007:3) daerah kantong-kantong kemiskinan menyebar di seluruh wilayah dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupun daerah-daerah kumuh di perkotaan. Penduduk yang tinggal di desa sangat rentan terhadap kemiskinan, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan dan umumnya mereka bekerja di sektor pertanian. Penduduk miskin yang tinggal di perdesaan umumnya melakukan aktifitas ekonomi pada sektor pertanian yang subsistens, petani gurem, atau buruh tani. Sedangkan yang berada pada wilayah pinggiran kota, mereka bekerja sebagai pekerja di jalanan, buruh kecil atau jasa perorangan. Lain halnya dengan hasil penghitungan BPS pada tahun 2008 untuk wilayah Sumatera Selatan, Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perdesaan hanya 0,64 sementara di daerah perkotaan mencapai 1,20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih parah dari pada daerah perdesaan. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin di desa cenderung lebih mendekati garis kemiskinan (BPS, 2009:5).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis ingin sekali meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi apa saja yang mempengaruhi

tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut diharapkan dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah ini. Penurunan tingkat kemiskinan ini sangat diharapkan agar tidak hanya sekedar penurunan secara kuantitatif melainkan secara kualitatif juga.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Dunia atau *World Bank* mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pendapatan penduduk (*income approach*) dengan batasan US 1 dollar perkapita per hari dan US 2 dollar perkapita per hari setelah disetarakan dengan daya beli penduduk di suatu daerah atau *purchasing power parity* (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009).

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam studi tentang kemiskinan, yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif yaitu pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditentukan oleh pihak lain terutama para ahli yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan standar kehidupan. Pendekatan subyektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang ditentukan oleh orang miskin itu sendiri yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial dari orang miskin dibandingkan dengan orang kaya yang ada di lingkungannya.

Dengan menggunakan pendekatan obyektif banyak ditemukan berbagai dimensi pendekatan yang digunakan oleh para ahli maupun lembaga. Bappenas (dalam jurnal ekonomi Setneg RI, 2009) menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain: pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan hak.

BPS (2007: 14) juga memberikan acuan mengenai kemiskinan dengan membuat garis kemiskinan (*poverty line*) yaitu dengan menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk (*consumption expenditure approach*) dengan batasan kemiskinan yang berpatokan pada kecukupan kebutuhan kalori (2100 kilokalori/kapita/hari) dan kebutuhan dasar non makanan lainnya per kapita per hari.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB, menunjukkan naiknya pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perekonomian tersebut. Robert Solow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai Model Pertumbuhan Solow. Model tersebut berasal dari fungsi produksi agregat sebagai berikut (Dornbusch *et al.*, 1987:700)

$$Y = A \cdot f(K, L) \dots\dots\dots \text{dimana,}$$

Y adalah output nasional (kawasan),
K adalah modal (kapital) fisik,

L adalah tenaga kerja, dan
A adalah teknologi.

Y akan meningkat ketika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi, yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produksi.

Dalam literatur, teori pertumbuhan endogen dikemukakan oleh Lucas dan Romer, dimana Lucas menyatakan bahwa akumulasi modal manusia, sebagaimana akumulasi modal fisik, menentukan pertumbuhan ekonomi. Romer berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi (Mankiw, 2003:218).

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan (Debraj, 1998:249).

Siregar (2006:7) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (pertanian atau industri).

Mankiw (2003:82) menjelaskan tiga teori inflasi yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi. Inti teori kuantitas adalah “inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, dan laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang”. Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan perekonomiannya, dengan kata lain inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif masyarakat akan barang dan jasa yang selalu melebihi barang dan jasa

yang bisa dihasilkan masyarakat. Teori Strukturalis adalah teori inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini menekankan pada ketegaran (infleksibilitas) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang.

Menurut definisi BPS (2008:3), inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus, atau inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang. Tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, ukuran inflasi yang paling banyak digunakan adalah: “*Consumer price index (CPI)*” atau “*cost of living index (CLI)*”. Indeks ini berdasarkan pada harga dari satu paket barang dan jasa yang dipilih dan mewakili pola pengeluaran konsumen. Barang dan jasa dalam paket itu dibobot sesuai dengan kepentingan relatif bagi konsumennya. Dan data harga diperoleh dalam bentuk indeks harga konsumen (IHK).

Jika pertimbangan kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan, maka inflasi adalah variabel yang relevan terhadap kemiskinan (Hermanto dan Dwi, 2008:27). Sebagai ilustrasi: suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan, ketika pertumbuhan pendapatannya sangat lambat (lebih rendah) dari laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit. Laju inflasi tersebut juga akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dari pertumbuhan pendapatan yang lambat dan laju inflasi yang relatif tinggi akan menyebabkan rumah tangga tersebut jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel untuk mengurangi kemiskinan, laju inflasi juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Sekitar 200 tahun yang lalu, pada tahun 1798 Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, mengajukan sebuah teori tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*), Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwasanya jumlah populasi di suatu negara akan meningkat secara cepat pada deret ukur atau tingkat geometrik (pelipatgandaan: 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya) setiap 30 atau 40 tahun, kecuali jika hal itu diredam oleh bencana kelaparan. Pada waktu yang bersamaan, karena adanya proses pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung atau tingkat aritmetik (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya). Bahkan karena lahan yang dimiliki setiap anggota masyarakat semakin lama semakin sempit, maka kontribusi marjinalnya terhadap total produksi pangan akan semakin menurun (Jhingan, 2004:97).

Dalam terbitan-terbitan belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, tetapi tidak sekaku semula, dengan hanya berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tak terbatas

hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua bentuk uraian tesis itu, Malthus berkesimpulan bahwa kuantitas manusia akan masuk dalam rawa-rawa kemiskinan dan banyak yang kelaparan. Dalam jangka panjang, tak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu, karena kenaikan suplai makanan terbatas, sedangkan "pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga eksistensi manusia" (Jhingan, 2004:101).

Intinya adalah Malthus memperkirakan di masa yang akan datang umat manusia akan kekurangan pangan akibat semakin meledaknya jumlah penduduk di dunia, namun banyak kalangan berpendapat bahwa teori Malthus ini banyak kelemahan, dan kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi. Malthus melupakan atau tidak memperhitungkan begitu besarnya dampak kemajuan teknologi dalam mengimbangi berbagai kekuatan negatif yang bersumber dari ledakan pertumbuhan penduduk. Asumsi Malthus mengenai ketersediaan lahan yang terbatas memang benar, tetapi ia tidak (pada waktu itu memang sulit untuk dibayangkan) memperhitungkan bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan kualitas atau produksi tanah; artinya, dari tanah yang kuantitas atau luasnya tetap, manusia bisa memperoleh hasil yang jauh lebih banyak berkat kemajuan teknologi.

Dua orang yang sangat terkenal dalam menentang teori Malthus adalah Karl Marx dan Friederich Engels. Prinsip dari pendapat mereka adalah bahwa tidak ada aturan yang bersifat umum untuk kependudukan (*population laws*). Kondisi penduduk, menurut mereka sangat tergantung kepada kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Jika Malthus mengatakan bahwa akibat pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan, tetapi pendapat ini mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan diserap oleh sistem ekonominya (Jhingan, 2004:115).

Teori-teori lain di era modern tentang kependudukan ini antara lain: John Stuart Mill, Ludwig Brentano, dan Emile Durkheim. John Stuart Mill adalah seorang filosof dan ekonom yang sangat berpengaruh pada abad 19, dimana dia menolak pendapat bahwa kemiskinan tidak dapat dielakkan (sebagaimana yang dikemukakan oleh Malthus), dan menolak bahwa kemiskinan merupakan hasil dari penerapan kapitalisme (sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx). Menurut Mill, Suatu negara yang ideal adalah negara yang semua masyarakat merasa nyaman secara ekonomis, penduduk harus stabil dan harus berkembang biak menurut budaya, moral, maupun aspek-aspek sosialnya, disamping juga secara ekonomis harus meningkat (Jhingan, 2004: 108).

Ludwig Brentano adalah ekonom dari Jerman. Seperti halnya Mill, Ludwig berpendapat bahwa tidak pada tempatnya mengharap orang miskin menurunkan kelahiran tanpa adanya motivasi tertentu. Beliau percaya bahwa "*prosperity*" atau "kesejahteraan" adalah penyebab menurunnya kelahiran. Emile Durkheim adalah seorang sosiolog yang lebih

memperhatikan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk. Emile berpendapat bahwa pembagian kerja merupakan ciri khas masyarakat modern yang semakin kompleks. Kompleksnya masyarakat mempunyai hubungan dengan pertumbuhan penduduk. Menurutnya, pertumbuhan penduduk akan menyebabkan semakin terspesialisasinya masyarakat yang disebabkan karena usaha untuk mempertahankan keberadaan akan semakin lebih berat apabila jumlah penduduk banyak (Jhingan, 2004:108).

Pada dasarnya, pendidikan yang baik itu haruslah mampu menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermanfaat serta menjadikan masyarakat lebih terbuka dan akses terhadap pendidikan. Seiring perkembangan zaman, pengertian pendidikan pun mengalami perkembangan. Beberapa pengertian pendidikan secara essensial sebenarnya mempunyai kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa pendidikan menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan lainnya.

Bahkan, telah disebutkan pula pengertian pendidikan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini diperkuat pula oleh UU Nomor 2 tahun 1989, yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (Prabancono, 2009:4).

Pendapatan yang rendah membuat penduduk miskin kurang memperhatikan atau tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dengan baik, sehingga produktivitas pun rendah. Situasi ini berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya, membentuk sebuah perangkap kemiskinan (Freire, 2000:24).

Menurut BPS (2007) untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan tertentu termasuk daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga variabel yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses fasilitas umum.

Jumlah skor dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan. Desa dengan skor gabungan 9 atau kurang digolongkan sebagai desa pedesaan, sedangkan desa dengan skor gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan.

Balisacan (2002:39) melakukan studi mengenai pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data subnasional yaitu sebanyak 285

kabupaten/kota. Studi tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki catatan yang mengesankan mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama dua dekade. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menunjukkan hubungan yang kuat untuk tingkat agregat. Faktor lain diantaranya adalah infrastruktur, sumber daya manusia, insentif harga pertanian, dan akses terhadap teknologi.

Studi tentang pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia juga dilakukan oleh Suryahadi (2006:28). Studi ini menekankan pada dampak lokasi dan komponen sektoral dari pertumbuhan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan diperdalam dengan membedakan pertumbuhan dan kemiskinan ke dalam komposisi sektoral dan lokasi. Hasil studi menunjukkan bahwa pertumbuhan pada sektor jasa di pedesaan menurunkan kemiskinan di semua sektor dan lokasi. Namun pertumbuhan jasa di perkotaan memberikan nilai elastisitas kemiskinan yang tinggi dari semua sektor kecuali pertanian perkotaan. Selain itu pertumbuhan pertanian di pedesaan memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kemiskinan di sektor pertanian pedesaan, yang merupakan kontributor terbesar kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mempercepat pengurangan kemiskinan adalah dengan menekankan pertanian di pedesaan dan jasa di perkotaan.

Suryadarma dan Suryahadi (2007:53) melakukan studi mengenai pengaruh pertumbuhan pada sektor swasta terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia untuk melihat dampak pertumbuhan di sektor publik dan swasta terhadap kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan di kedua sektor tersebut secara signifikan mengurangi kemiskinan dan menghasilkan elastisitas yang relatif sama.

Munandar, Kurniawan, dan Santoso (2007:31) melakukan penelitian dengan tujuan mencari hubungan antara kebijakan moneter dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan mengkaji data regional Indonesia selama tahun 1984-2005. Penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kebijakan moneter yang mengusahakan inflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil, justru merupakan kebijakan yang menurunkan tingkat kemiskinan dan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih baik. Hal ini secara empiris membuktikan bahwa kebijakan moneter berhati-hati (*prudent*) merupakan kebijakan moneter yang berpihak pada si miskin (*pro poor*).

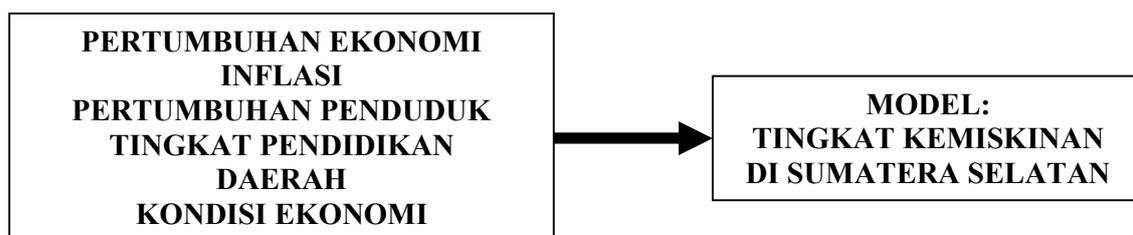
Ridwan (2005:36), meneliti tentang "Hubungan Tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: kasus pekerja sektor Formal DKI Jakarta. Penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan estimasi model regresi logistik, menunjukan terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah probabilitas miskin, sebaliknya semakin rendah tingkat

pendidikan semakin tinggi probabilitas miskin. Hasil perhitungan rasio Gini dan persentase pendapatan 40 persen, pekerja berpendapatan terendah pada masing-masing tingkat pendidikan terdapat hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan ketimpangan pendapatan sampai tingkat diploma/Akademi. Rasio Gini golongan pekerja berpendidikan SD ke bawah adalah 0,392, SLTP/ sederajat adalah 0,339 SLTA/ sederajat adalah 0,326 Diplomat/akademi adalah 0,309 dan S1 ke atas adalah 0,343.

Prabancono (2009:46) telah melakukan penelitian mengenai pendidikan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan. Dia menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan terutama masyarakat pedesaan. Menurutnya, masyarakat miskin harus mendapatkan motivasi yang tinggi untuk belajar dan bekerja keras agar menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan sehingga menambah masyarakat berpengetahuan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan antara lain: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, klasifikasi daerah dan kondisi krisis. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang rendah, jumlah penduduk yang terkendali, serta meningkatnya tingkat pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Secara skematis faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan menurut klasifikasi daerah di Sumatera Selatan, dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Berdasarkan teori, studi penelitian sebelumnya dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, daerah dan kondisi ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian adalah persentase penduduk miskin berdasarkan klasifikasi daerah yaitu daerah perkotaan dan daerah

perdesaan selama tahun 1993-2009. Penelitian ini sangat terbatas karena hanya dilakukan dengan meneliti beberapa indikator ekonomi dan sosial yang bersifat makro saja, dengan variabel tidak bebasnya adalah tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun di daerah perkotaan dan perdesaan.

Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah melalui pembentukan model ekonomi yang kemudian akan diestimasi melalui pendekatan regresi. Hasil estimasi tersebut dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan data yang digunakan secara kuantitatif. Hasil estimasi model ini diperoleh dari metode penghitungan dengan bantuan software *SPSS (Statistical Package for The Social Science) Versi 13*.

Tabel 1
Hasil Estimasi Model

Variabel	Variabel yang diukur	Satuan	Sumber
Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan	%	Badan Pusat Statistik, "Data dan Informasi Kemiskinan" berbagai tahun.
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	Badan Pusat Statistik, "PDRB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Lapangan Usaha" berbagai tahun
Laju Inflasi	Tingkat Inflasi Kota Palembang Dan Inflasi Pedesaan	%	Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik"
Penduduk	Pertumbuhan Penduduk daerah perkotaan dan pedesaan	%	Badan Pusat Statistik, "Statistik Kependudukan"
Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	%	Badan Pusat Statistik, "Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan, Data Susenas"
Daerah	Perkotaan (1) Perdesaan (0)	-	Badan Pusat Statistik
Kondisi Ekonomi	Sebelum tahun 1998 (0) Setelah tahun 1998 (1)	-	

Dalam melakukan analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dummy daerah dan dummy kondisi ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan digunakan model regresi berganda yang dibentuk dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square – OLS*), yaitu penaksiran (estimasi) terhadap seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dengan penggunaan model regresi berganda sederhana (*Multiple Regression*). Untuk mendapatkan hasil estimasi ditentukan dahulu persamaan regresi, di mana variabel independen adalah variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dummy daerah dan dummy kondisi ekonomi serta variabel dependen

adalah tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Secara matematis, model yang digunakan untuk menganalisis dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y = f [X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6] \dots\dots\dots (1)$$

di mana :

- Y = Tingkat Kemiskinan
- X₁ = Pertumbuhan ekonomi
- X₂ = Tingkat Inflasi
- X₃ = Tingkat Pendidikan
- X₄ = Pertumbuhan Penduduk
- X₅ = Dummy Daerah
- X₆ = Dummy Kondisi Ekonomi

Menurut Gujarati (1978: 49) bentuk sederhana dari model regresi linier berganda adalah:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_i X_i + e_i \dots\dots\dots (2)$$

di mana

- Y_i = variabel tidak bebas (*dependent variable*),
- X_{1,2,3, ..., i} = variabel bebas (*independent variable*)
- α = konstanta
- β_{1,2,3, ..., i} = parameter dari variabel X_{1,2,3, ..., i} , atau tingkat kecondongan kurva.
- e_i = variabel random. (Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi).

Dari bentuk model regresi yang disajikan diatas, maka fungsi $Y = f [X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6]$ dapat dinyatakan dalam bentuk model matematis dengan menggunakan persamaan regresi linier, sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e_i \dots\dots\dots (3)$$

Dari model persamaan regresi di atas ditentukan bahwa α₀ (konstanta) dan β₁₋₆ merupakan parameter, dan e_i merupakan variabel random dari model regresi. Sebelum melakukan estimasi parameter dan pengujian terhadap model yang terbentuk, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik dengan menggunakan :

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan suatu pengujian terhadap variabel random (e_i) yang mempunyai hubungan yang terkait dan saling berpengaruh dengan variabel independen dalam model, atau dengan kata lain tidak memasukkan variabel yang harus ada dalam model. Untuk mendeteksi apakah ada gejala autokorelasi dapat digunakan uji statistik Durbin-Watson, dengan menggunakan tabel nilai Durbin-Watson yang dibandingkan dengan nilai hasil estimasi dari uji DW.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang linier antar variabel independen dalam model penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan pengganggu dalam variabel yang mempunyai varian sama. Jika terjadi kesalahan pengganggu tidak mempunyai varian yang sama berarti telah terjadi heteroskedastisitas, yang mengakibatkan hasil uji hipotesis pada model menjadi tidak signifikan. Pengujian ini menggunakan uji Park, di mana me-regresi variabel residu sebagai variabel dependen dengan setiap variabel independen di dalam model. Jika t hitung dari setiap regresi tidak signifikan, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan diestimasi sebagai berikut:

$$Y = 41,591 - 0,404 X_1 - 0,067 X_2 - 0,300 X_3 + 0,084 X_4 + 3,653 D_1 + 3,701 D_2 \quad \dots(4)$$

(3,361)* (-1,773)* (-1,752)* (-1,755)* (0,356)* (2,387)* (1,751)*

keterangan :

- Y = Tingkat Kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan
- X₁ = Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan
- X₂ = Tingkat Inflasi di Propinsi Sumatera Selatan
- X₃ = Tingkat Pendidikan di Propinsi Sumatera Selatan
- X₄ = Pertumbuhan Penduduk di Propinsi Sumatera Selatan
- D₁ = Dummy Kondisi Ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan
(0=Kondisi Sebelum Krisis dan 1= Kondisi Sesudah Krisis)
- D₂ = Dummy Daerah di Propinsi Sumatera Selatan
(0 = Perdesaan dan 1 = perkotaan)
- (*) = Nilai dalam kurung adalah nilai t-hitung.

Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan sebelum mengolah dan menganalisis output regresi yang dihasilkan adalah pengujian terhadap pelanggaran asumsi-asumsi regresi klasik yang terjadi, yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Tujuan dari pengujian ini adalah agar data yang akan diolah nanti sudah terbebas dari segala pelanggaran asumsi-asumsi tersebut, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan output yang BLUE (*Best Linear Unbisaed Estimator*).

Jika terjadi pelanggaran terhadap asumsi-asumsi tersebut maka diperlukan perlakuan tertentu untuk membebaskan data tersebut dari pelanggaran yang terjadi.

a. Multikolinearitas

Indikasi adanya multikolinearitas dalam data adalah dengan melihat hasil uji t dan uji F pada output regresi. Multikolinearitas sangat mungkin ada jika dari hasil uji t ada variabel yang tidak signifikan, sedangkan uji F-nya signifikan. Cara lain untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dari suatu data, adalah dengan melihat nilai tolerance (TOL) dan VIF. Dengan metode backward yang digunakan dalam analisis regresi ini maka secara otomatis variabel mana yang menyebabkan terjadinya multikolinearitas akan dihilangkan dalam model, sehingga didapatkan model yang terbaik yang sudah terbebas dari multikolinearitas. Output yang dihasilkan dari hasil pengolahan data didapatkan nilai-nilai pada Tabel 4.9.

Dari output SPSS untuk uji multikolinearitas ini, terlihat bahwa model pertama pada persamaan 4.1 mengalami gejala multikolinearitas. Ada 1 variabel yang tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen, yaitu pertumbuhan penduduk. Dengan menggunakan metode backward, didapatkan model kedua dengan nilai VIF setiap variabel di bawah 10 (nilai 10 merupakan indikasi adanya multikolinearitas), nilai VIF yang tertinggi hanya mencapai 8,460, juga dari nilai Tolerance-nya yang masih jauh di bawah 1 (dimana nilai Tolerance tertinggi sebesar 0,336) sebagai indikasi bahwa tidak terjadinya pelanggaran multikolinearitas di dalam data tersebut, berdasarkan Gujarati di dalam *Basics Econometrics*.

Model kedua untuk perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yang terbebas dari gejala multikolinearitas diestimasi sebagai berikut:

$$Y = 41,128 - 0,417 X_1 - 0,068 X_2 - 0,291 X_3 + 3,544 D_1 + 3,679 D_2 \quad \dots(5)$$

(3,395)* (-1,883)* (-1,812)* (-1,748)* (2,401)* (1,769)*

keterangan :

- Y = Tingkat Kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan
- X₁ = Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan
- X₂ = Tingkat Inflasi di Propinsi Sumatera Selatan
- X₃ = Tingkat Pendidikan di Propinsi Sumatera Selatan
- D₁ = Dummy Kondisi Ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan
(0=Kondisi Sebelum Krisis dan 1= Kondisi Sesudah Krisis)
- D₂ = Dummy Daerah di Propinsi Sumatera Selatan
(0 = Perdesaan dan 1 = perkotaan)
- (*) = Nilai dalam kurung adalah nilai t-hitung.

Tabel 2
Pengujian Variabel Regresi

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	41,591	12,375		3,361	,002		
	pert_ekonomi	-,404	,228	-,519	-1,773	,088	,229	4,371
	inflasi	-,067	,038	-,424	-1,752	,091	,334	2,990
	pertpenddk	,084	,237	,053	,356	,724	,873	1,146
	APS	-,300	,171	-,723	-1,755	,091	,115	8,665
	krisis	3,653	1,531	,603	2,387	,024	,307	3,261
	daerah	3,701	2,114	,671	1,751	,091	,134	7,490
2	(Constant)	41,128	12,114		3,395	,002		
	pert_ekonomi	-,417	,221	-,535	-1,883	,070	,235	4,259
	inflasi	-,068	,038	-,431	-1,812	,081	,336	2,973
	APS	-,291	,166	-,701	-1,748	,091	,118	8,460
	krisis	3,544	1,476	,585	2,401	,023	,319	3,130
	daerah	3,679	2,080	,667	1,769	,088	,134	7,484

a. Dependent Variable: kemiskinan

b. Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Untuk permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi di dalam pengolahan data panel sebenarnya sudah bisa teratasi sendiri. Hal ini disebabkan karena pengolahan data panel menggunakan GLS (*Generalized Least Square*), dimana penggunaan metode GLS ini dapat mengoreksi permasalahan autokorelasi terjadi (Gujarati, 1995:362).

Cara yang paling sering digunakan dalam mengatasi autokorelasi pada data panel adalah dengan memasukkan variabel autoregressif (AR) hingga AR ke-n (AR(n)) sampai didapat nilai DW yang tepat, yang menunjukkan data telah bebas dari autokorelasi. Tepat tidaknya nilai DW yang didapat harus dibandingkan dengan nilai DW dari tabelnya. Seperti pada output di lampiran 2, nilai DW yang didapat dengan AR(1) sebesar 1,212. Dari DW tabel didapat nilai DW (N = 34 dan K = 5 regresor) sebesar $du=1,15$ dan $dl=1,81$. Data panel yang terbebas dari autokorelasi jika nilai DW hitung (DW output) berada diantara du dan $4-du$ atau diantara nilai 1,15 sampai 2,85, jadi karena nilai DW hitung sebesar 1,212 berada diantara 1,15 dan 2,85, maka disimpulkan bahwa data panel telah terbebas dari autokorelasi.

Berdasarkan beberapa pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa model pertumbuhan tingkat kemiskinan tidak menyimpang dari asumsi klasik (tidak mengalami gejala multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas). Namun hanya terdapat lima variabel yang secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tingkat kemiskinan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pendidikan, dummy kondisi ekonomi, dan dummy daerah.

Berdasarkan hasil uji F (uji seluruh variabel pada model), diketahui nilainya sebesar 4,938 pada level signifikansi sebesar 0,002 (signifikan pada tingkat kepercayaan hampir 100 %), yang berarti secara bersama-sama variabel-variabel dalam model tidak bernilai nol (persamaan regresi signifikan) sehingga disimpulkan bahwa secara bersama-sama (*overall*) pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pendidikan, dummy kondisi ekonomi, dan dummy daerah merupakan faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3
Hasil Pengujian Statistik Model Tingkat Kemiskinan
Provinsi Sumatera Selatan

Variabel	Elastisitas	Std.Error	T- hit	α	F	ket
1 Konstanta	41,128	12,114	3,395	0,002	4,938	R ² = 0,469 r = 0,685 DW = 1,212
2 Pert.Ekonomi	-0,417	0,221	-1,883	0,070	sig=0,002	
3 Inflasi	-0,068	0,038	-1,812	0,081		
4 Pendidikan	-0,291	0,166	-1,748	0,091		
5 Kondisi Ekonomi	3,544	1,476	2,401	0,023		
6 Daerah	3,679	2,080	1,769	0,088		

Sumber : Lampiran 6

Kemudian berdasarkan hasil uji ketepatan letak taksiran garis regresi (*goodness of fit – test*) yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R²), terlihat bahwa nilai R² sebesar 0,469. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 46,9 persen variasi-variasi yang terjadi pada tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan oleh variasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pendidikan, dummy kondisi ekonomi, dan dummy daerah sedangkan sisanya yang sebesar 53,1 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 3 bahwa keterbatasan penelitian ini hanya melihat pada variabel secara makro, sehingga kemungkinan masih banyak variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hipotesis penelitian, dari keenam variabel yang diduga mempengaruhi perkembangan tingkat kemiskinan hanya terdapat 4 variabel yang pengaruhnya sesuai dengan teori, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dummy kondisi ekonomi, dan dummy daerah. Sedangkan 1 variabel bertolak belakang dengan teori ekonomi yang ada yaitu inflasi. Satu variabel lagi yaitu pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan.

Hal ini sejalan dengan hasil uji statistik t, yang memperlihatkan bahwa hanya lima variabel tersebut yang lolos uji. Secara lebih lengkap dapat dilihat dari nilai uji t sebesar -1,883 untuk variabel pertumbuhan ekonomi dengan level signifikansi sebesar 0,070 ($\alpha = 7$ persen) atau dapat dikatakan kesahihannya (validitas) dalam model memiliki tingkat

kepercayaan 93 persen ($1-\alpha = 0,93$). Kemudian variabel inflasi memiliki nilai t sebesar -1,812, yang berarti signifikan pada level 0,081 atau dapat dikatakan kesahihannya (validitas) dalam model memiliki tingkat kepercayaan mencapai 91,9 persen ($1-\alpha = 0,919$), sedangkan variabel pendidikan memiliki nilai t sebesar -1,748, yang berarti signifikan pada level 0,091 atau dapat dikatakan kesahihannya (validitas) dalam model memiliki tingkat kepercayaan mencapai 90,9 persen ($1-\alpha = 0,909$). Uji t pada kedua variabel dummy yang digunakan dalam model yaitu dummy kondisi ekonomi dan dummy daerah juga memperlihatkan bahwa kedua variabel dummy tersebut lolos uji. Dummy kondisi ekonomi memiliki nilai t sebesar 2,401, yang berarti signifikan pada level 0,023 atau dapat dikatakan kesahihannya (validitas) dalam model memiliki tingkat kepercayaan mencapai 97,7 persen ($1-\alpha = 0,977$). Dummy daerah memiliki nilai t sebesar 1,769, yang berarti signifikan pada level 0,088 atau dapat dikatakan kesahihannya (validitas) dalam model memiliki tingkat kepercayaan mencapai 91,2 persen ($1-\alpha = 0,912$).

Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan metode regresi linier berganda, diketahui nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi sebesar -0,417. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen pada pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 0,417 persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).

Kondisi ini sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa penambahan nilai PDRB pada perekonomian suatu wilayah akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Anomali ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan memberikan dampak secara langsung bagi pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Hubungan yang erat antara kedua variabel ini dapat diilustrasikan sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap tahun n-1. Sehingga bila perubahannya cukup tinggi berarti pertumbuhannya cukup tinggi pula. Apabila pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun yang sama tidak setinggi pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan perkapita masyarakat akan naik, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Dari deskripsi ini, variabel pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara mengembangkan semua sektor ekonomi agar dapat menghasilkan nilai PDRB yang tinggi. Sektor-sektor pembentuk PDRB yang harus dikembangkan tidak hanya di wilayah perkotaan, melainkan juga semua sektor yang ada di wilayah perdesaan. Di wilayah perkotaan, misalnya

dengan pengembangan sektor skunder dan sektor tersier (industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa), sedangkan di wilayah perdesaan pengembangan di sektor primer (pertanian dan pertambangan penggalian). Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada gambaran umum perekonomian di Sumatera Selatan bahwa sumber-sumber yang membentuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yang tertinggi adalah sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor pertanian. Masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,8 persen, 0,7 persen dan 0,6 persen.

Inflasi dan Tingkat Kemiskinan

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan metode regresi linier berganda, diketahui nilai elastisitas laju inflasi sebesar -0,068. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen pada laju inflasi akan mengakibatkan pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 0,068 persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Nilai elastisitas yang negatif pada variabel inflasi terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munandar, Kurniawan, dan Santoso pada tahun 2007 yang mencari hubungan antara kebijakan moneter dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dari hasil kajiannya, secara empiris terbukti bahwa kebijakan moneter berhati-hati (*prudent*) adalah kebijakan moneter yang berpihak pada si miskin (*pro poor*).

Kebijakan moneter berhati-hati adalah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi. Terjadinya inflasi yang terkendali diharapkan dapat menggerakkan sisi penawaran dalam perekonomian (*supply-side policy*). Bergeraknya sisi penawaran memiliki sifat yang tidak inflatoir sehingga turut berkontribusi pada rendahnya inflasi dan stabilnya ekonomi makro pada periode berikutnya.

Di wilayah Sumatera Selatan, inflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan merupakan penimbang terbesar terhadap angka inflasi secara umum. Dari data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada lampiran 5, inflasi yang terjadi di Kota Palembang pada kelompok pengeluaran bahan makanan ini mungkin sangat menguntungkan bagi penduduk yang berada di perdesaan, karena mayoritas penduduk perdesaan mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Naiknya harga konsumen untuk bahan makanan, membuat petani sangat diuntungkan, sehingga menyebabkan turunnya kemiskinan di perdesaan.

Pada saat terjadi inflasi, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat perkotaan. Inilah juga yang menyebabkan mengapa indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perdesaan seperti yang telah dijelaskan pada gambaran umum kemiskinan di Sumatera Selatan. Adanya

beberapa kebijakan pemerintah yang sangat gencar untuk menurunkan tingkat kemiskinan, menyebabkan inflasi yang terjadi ini diikuti pula dengan penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa di Indonesia, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan oleh pemerintah era orde baru sampai dengan era reformasi. Pada masa orde baru penanggulangan kemiskinan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1993 (Mubyarto, 1998:73), pemberian kredit bergulir bagi masyarakat miskin, dan program jaring pengaman sosial (*social safety net*), pada tahun 1998. Kemudian pada era reformasi, pada tahun anggaran 1998/1999 diterapkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), diterapkan juga pada tahun 1999. Program beras miskin (raskin) masih terus dijalankan sampai sekarang. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah, seiring dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Maret 2005 dan Oktober 2005, adalah program kompensasi subsidi BBM bagi rakyat miskin. Bentuk kompensasi BBM ini antara lain Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS), program asuransi kesehatan bagi penduduk miskin (Askeskin), dan pemberian BLT atau Bantuan Langsung Tunai (Budiyanto, 2007:2). Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan ini juga masih berlangsung hingga saat ini.

Dari data inflasi yang terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2009, ternyata wilayah perkotaan mengalami inflasi sebesar 1,85 persen, angka terendah selama sepuluh tahun terakhir (tahun 2000-2009), dan angka ini menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi cukup terkendali. Di wilayah perdesaan untuk tahun yang sama terjadi inflasi sebesar 5,63 persen.

Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kemiskinan

Dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan metode regresi linier berganda, diketahui nilai elastisitas tingkat pendidikan sebesar -0,291. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen pada tingkat pendidikan akan mengakibatkan pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 0,291 persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Tingkat pendidikan yang terlihat dari angka partisipasi sekolah (APS) masyarakat perkotaan dan perdesaan terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Pada saat APS meningkat maka tingkat kemiskinan menurun dan begitu pula sebaliknya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan Sumatera Selatan adalah dengan melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk wilayah perdesaan dapat dilakukan dengan pembangunan SD-SMP Satu Atap atau pembangunan unit sekolah yang baru. Dengan adanya SD-SMP yang terintegrasi siswa-siswi yang telah menamatkan

jenjang SD tidak perlu mencari SMP yang kemungkinan berada di daerah yang jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua juga dapat berkurang. Sehingga pencanangan program wajib belajar 9 tahun dapat terpenuhi. Pembangunan unit sekolah yang baru diharapkan juga dapat meningkatkan partisipasi penduduk miskin untuk bersekolah.

Signifikansinya tingkat pendidikan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa membangun pendidikan dapat mengatasi kemiskinan di Sumatera Selatan. Pembangunan pendidikan adalah modal utama dalam membangun suatu bangsa, karena pendidikan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Apabila Sumatera Selatan ingin terbebas dari kemiskinan, pembangunan dunia pendidikan adalah syarat mutlak yang harus dilakukan. Masyarakat miskin harus mendapat motivasi yang tinggi untuk belajar dan bekerja keras agar dapat menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan. Dengan begitu, akan menambah masyarakat yang berpengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.

Analisis Perbedaan Model Pengaruh Kondisi Ekonomi Dan Daerah

Tabel 4 menunjukkan bahwa perbedaan antar model tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan hanya dijelaskan oleh perbedaan pada masing-masing konstanta yang berarti perbedaan ini akan berpengaruh terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Walaupun nilai-nilai konstanta ini harus diinterpretasikan secara hati-hati namun paling tidak secara kuantitatif perbedaan itu cukup terlihat. Berdasarkan hasil *overlay* dari keempat model yang ditunjukkan pada tabel 4.19 maka akan terlihat bahwa nilai konstanta tertinggi adalah pada kondisi setelah krisis ekonomi di daerah perkotaan (48,351) yang berarti tingkat kemiskinan setelah krisis ekonomi di daerah perkotaan akan lebih tinggi dibandingkan kondisi yang lain.

Tabel 4
Perbedaan Model Tingkat Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah dan Kondisi Ekonomi di Sumatera Selatan

Kondisi Ekonomi	Perkotaan	Pedesaan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Sebelum Krisis Ekonomi	$TK = 44,807 - 0,417 X_1 - 0,068 X_2 - 0,291 X_3$	$TK = 41,128 - 0,417 X_1 - 0,068 X_2 - 0,291 X_3$
Sesudah Krisis Ekonomi	$TK = 48,351 - 0,417 X_1 - 0,068 X_2 - 0,291 X_3$	$TK = 44,672 - 0,417 X_1 - 0,068 X_2 - 0,291 X_3$

Sumber : Hasil Olahan Model Tingkat Kemiskinan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan melalui analisis regresi linier berganda pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dari enam variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan ternyata ada lima variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pendidikan, dummy kondisi ekonomi, dan dummy daerah, dan satu variabel yang tidak signifikan yaitu pertumbuhan penduduk.
2. Pengaruh masing-masing variabel ditunjukkan oleh koefisien regresinya yaitu untuk pertumbuhan ekonomi sebesar -0,417, inflasi sebesar -0,068, dan koefisien regresi untuk tingkat pendidikan sebesar -0,291, sedangkan pada variabel dummy pengaruhnya ditunjukkan oleh perbedaan model tingkat kemiskinan berdasarkan kondisi ekonomi baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.
3. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang bernilai negatif, sedangkan kedua variabel dummy menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan pada kondisi sebelum dan sesudah krisis tahun 1997 dan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan.

Saran dan Implikasi Kebijakan

Berpijak dari hasil kesimpulan penelitian ini maka beberapa langkah dapat ditempuh dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun saran dan implikasi kebijakan dimaksud adalah:

1. Tingkat elastisitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang besar dalam penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pertumbuhan yang berkualitas dan merata, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di perkotaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan di sektor-sektor informal, sedangkan di pedesaan dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana di sektor pertanian.
2. Pendidikan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah seharusnya juga menempatkan persoalan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pengambilan kebijakannya. Salah satu cara adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih banyak. Di perkotaan, dapat dikembangkan melalui pembangunan balai-balai latihan kerja, sedangkan di pedesaan dapat ditingkatkan melalui pembangunan sekolah-sekolah satu atap untuk SD dan SMP, dan sekolah lanjutan lainnya, baik kejuruan maupun sekolah menengah umum.

3. Walaupun laju inflasi mempunyai nilai koefisien yang negatif terhadap tingkat kemiskinan, tetapi pemerintah tetap harus dapat mengendalikan inflasi, karena pengendalian inflasi dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan yang diperolehnya menjadi lebih berarti dalam memenuhi kebutuhan dasar atau meningkatkan kualitas hidup mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, I Gusti Ngurah. (2004). *Statistika: Penerapan Metode Analisis untuk Tabulasi Sempurna dan Tak Sempurna dengan SPSS*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Balisacan, A., E.M. Pernia, dan A.Asra, 2003. *Revisiting Growth and Poverty in Indonesia: What do Subnacional Data Show?.* *Bulletin of Indonesian Economic Studies Volume 39*, Issue 3. December 2003
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Budiyanto, Aris. 2007. *Analisis Kemiskinan di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Tesis. Universitas Sriwijaya, (tidak dipublikasikan) Palembang. 2007.
- Debraj Ray. 1998. *Development Economics*. Princeton University. Princeton, New Jersey.
- Dornbusch, R., S. Fischer, dan R. Startz. 1987. *Macroeconomics*. 9th ed. McGraw-Hill. Boston.
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Gujarati, Damodar. 1978. *Ekonometrika Dasar* (terjemahan oleh Sumarno Zain). Penerbit Erlangga. Jakarta.
- _____, Damodar. 1995. *Basic Econometrics*. Third Edition. McGraw-Hill, Inc
- Harian Umum Sinar Harapan (Selasa, 10 November 2009). *Curah Pendapat tentang Kemiskinan*. Jakarta.
- Hermanto, S. Dwi, W. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Jurnal. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, Ph.d. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah. (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang)*. PT. Erlangga. Jakarta.
- Kuswara, A.A. 2003. *Pengaruh Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Sosiodemografis terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Liani, S. 2008. *Kemiskinan di Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi*. Hasil Penelitian. Bank Indonesia. Jakarta.
- Mankiw, N.Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mubyarto, Budi Soeradji. 1998. *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Laporan Penelitian di Daerah-Daerah*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Munandar, Haris. Kurniawan, Ferry. Santoso, Pribadi. 2007. *Mencari Hubungan Antara Kebijakan Moneter Dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Kajian Menggunakan Data Regional Indonesia*. Jurnal Ekonomi. Agustus 2007.
- Prabancono, Haryo. 2009. *Pendidikan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Ekonomi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Ridwan. 2005. *Hubungan Tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan ketimpangan Pendapatan : Kasus Pekerja Sektor Formal DKI Jakarta*. Tesis. Universitas Sriwijaya, (tidak dipublikasikan) Palembang. 2005.
- Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia. 2009. *Upaya Pengurangan Kemiskinan*. Jurnal. <http://www.setneg.go.id>.

- Siregar, H. 2006. *Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja*. Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan. INDEF. Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan (1994). *Pengantar Ekonometrika*, BPFE Yogyakarta.
- Suryadarma, D. dan A. Suryahadi. 2007. *The Impact of Private Growth Sector on Poverty Reduction: Evidence from Indonesia*. SMERU Working Paper. April 2007.
- Suryahadi, A., D. Suryadarma. dan A. Sumarto. 2006. *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Pectoral Components of Growth*. SMERU Working Paper. August 2006
- Walpole, E.R. 1995. *Pengantar Statistika*, edisi ke-3. Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Weeks, J.R. 1986. *Population*. California. Wadworth Publising Company.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007*. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*. BPS. Jakarta
- _____. Provinsi Sumsel. 2008. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan Tahun 2008*. BPS. Palembang.
- _____. Provinsi Sumsel. 2009. *Statistik Kependudukan Sumatera Selatan Tahun 2009*. BPS. Palembang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel. 2003. *Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2002*. BPS. Palembang.
- _____. Provinsi Sumsel. 2009. *Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2009*. BPS. Palembang.
- _____. Provinsi Sumsel. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2007*. BPS. Palembang.
- _____. Provinsi Sumsel. 2008. *Inflasi Kota Palembang Tahun 2008*. BPS. Palembang.
- _____. Provinsi Sumsel. 2009. *Kemiskinan di Sumatera Selatan*. Berita Resmi Statistik. BPS. Palembang.
- _____. Provinsi Sumsel. 2009. *Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Selatan*. Berita Resmi Statistik. BPS. Palembang.
- _____. Provinsi Sumsel. 2009. *Perekonomian Triwulan Ke-IV Sumatera Selatan*. Berita Resmi Statistik. BPS. Palembang.